

SUMBANGAN PIKIRAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005 - 2025

Sayidiman Suryohadiprojo*)

Dalam Perencanaan Strategis fungsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah memberikan gambaran tentang hal-hal yang ingin dicapai dalam waktu 20 tahun mendatang yang bersifat pedoman bagi pembuatan Rencana Jangka Menengah. Gambaran setelah memperoleh persetujuan mengantarkan pembuatan program-program sebagai Rencana Jangka Menengah. Program-program itu kemudian diterjemahkan dalam tindakan dan kegiatan sebagai Rencana Tahunan yang sekaligus enunjukkan harga (cost) setiap tindakan itu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah RPJP untuk pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Berhubung dengan itu uraian ini menunjukkan gambaran umum yang ingin dituju serta kecenderungan yang akan dihadapi negara dan bangsa dalam masa 20 tahun mendatang.

Tujuan

Tujuan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 adalah menetapkan sasaran yang ingin dicapai bangsa Indonesia dalam 20 tahun mendatang dalam rangka perjuangan mencapai tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Kondisi Lingkungan

Perkembangan negara dan

bangsa selama 20 tahun mendatang tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan yang dihadapi, yaitu kondisi internasional maupun kondisi nasional.

Kondisi internasional yang akan dihadapi adalah bagaimana perkembangan yang terjadi di dunia sebagai akibat perilaku dan tindakan para aktor internasional utama serta interaksi antara mereka. Indonesia sebagai bangsa yang hidup di posisi silang yang amat penting bagi per-

*) Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo, Mantan Gubernur Lemhannas

caturan internasional akan sangat dipengaruhi oleh tindakan dan interaksi antara mereka, tetapi di pihak lain juga mempengaruhi mereka.

Amerika Serikat sebagai aktor utama dengan kekuatan dan kemampuan di segala aspek kehidupan sehingga menjadi satu-satunya adikuasa (*the single superpower*) di dunia menimbulkan pengaruh terpenting. Perlakuan AS makin jelas arahnya, yaitu hendak menjadikan dirinya penentu arah bagi kehidupan semua bangsa dan menguasai dunia. Politik luar negerinya yang menekankan diterima dan dilakukannya demokrasi versi AS sebagai sistem politik setiap bangsa, disertai berlakunya Hak Azasi Manusia dan liberalisasi ekonomi, adalah cara yang digunakannya untuk menerapkan kekuasaannya di mana-mana serta makin memperteguh kepentingan nasionalnya.

Dalam usaha itu AS mengalami tantangan dari gerakan Al Qaeda di bawah pimpinan Usama bin Laden. AS telah menyatakan perang terhadap terorisme untuk memusnahkan Al Qaeda. Akan tetapi sekalipun AS adikuasa, belum jelas apakah dapat menundukkan Al Qaeda dalam 5-10 tahun mendatang. Kelemahan utama AS justru terletak pada kekuatannya, yaitu secara berlebihan sadar akan

kekuatannya, sehingga kurang peka dalam menghadapi kekuatan Islam moderat untuk bermanfaat bagi kepentingannya.

Tantangan AS berikut dalam usahanya menguasai dunia adalah China, Eropa dan Rusia sebagai tiga aktor yang besar kemampuannya mengembangkan diri di masa mendatang. China sudah lama diprediksi akan menjadi pesaing dalam bidang ekonomi untuk AS. Akan tetapi mengingat jumlah penduduk China kemungkinan itu paling cepat baru sekitar tahun 2020 akan terwujud. Masih menjadi pertanyaan apakah dengan berkembangnya ekonomi China juga mampu mengembangkan kekuatan militernya, khususnya kekuatan di laut dan udara yang dapat mengimbangi kekuatan AS. Kalau itu terjadi akan timbul pertanyaan bagaimana sikap Jepang yang hingga kini lebih bersandar kepada AS dalam politik internasionalnya. Jepang dapat berubah sikap dan menempuh jalan menjadi kekuatan sendiri. Dapat pula bersama China mengajak bangsa Asia Timur menjadi pusat kekuatan dunia, di samping AS dan Uni Eropa, atau Jepang tetap memelihara sikapnya sekarang yang bersandar AS.

Eropa dalam Uni Eropa juga makin menunjukkan diri sebagai kekuatan ekonomi yang makin

hebat. Apabila hal itu terjadi menjadi pertanyaan bagaimana sikap Inggris yang hingga kini lebih dekat AS atau menjadi jembatan antara AS dan UE. Akan tetapi UE sukar berkembang sebagai kekuatan militer yang independent dalam ukuran adikuasa. Rusia mempunyai potensi banyak untuk berkembang sebagai kekuatan besar, bahkan adikuasa. Akan tetapi kelemahan Rusia adalah dalam bidang politik dan kepemimpinan sehingga dalam kurun waktu 20 tahun mendatang juga belum dapat menandingi AS. Menjadi pertanyaan apakah Rusia akan tetap berdiri sendiri atau bergabung dengan UE. Meskipun para aktor ini masing-masing belum dapat menandingi AS, tetapi mereka tidak akan setuju dengan hegemoni AS yang secara unilateral menentukan segala perkembangan internasional.

Namun kerawanan utama AS bukan terletak pada kekuatan pihak lain, melainkan pada dirinya sendiri. Kalau AS kurang dapat mengendalikan diri dan secara sembrono memboroskan kekuatannya untuk petualangan-petualangan seperti Perang Irak, dan perang-perang lain terhadap negara yang relatif kecil seperti Iran atau Siria, mungkin juga Korea Utara, justru hal itu akan membuat AS sangat berkurang kekuatannya. Sebab

AS tidak cukup memiliki kesabaran dan kecanggihan menghadapi persoalan yang bersifat manusiawi dan terlalu mengutamakan teknologi dalam menghadapi persoalan. Hal itu sangat dibuktikan oleh kekalahannya di Perang Vietnam dan sekarang tidak kunjung menyelesaikan usahanya di Irak.

Kondisi nasional sangat terpengaruh oleh kondisi internasional itu. Indonesia sebagai negara dengan penduduk lebih dari 200 juta orang adalah juga negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Hal ini sangat menjadi perhatian AS dalam menghadapi Al Qaeda. AS khawatir bahwa Islam di Indonesia dapat terbawa dalam sikap radikal Al Qaeda atau secara aktif bergerak dalam Jemaah Islamiyah yang oleh AS dituduh sebagai cabang Al Qaeda di Asia Tenggara. Terjadinya peristiwa bom di Bali dan hotel Marriott di Jakarta memperkuat kekhawatiran AS.

Selain itu AS juga melihat kemungkinan Indonesia menjadi dekat dengan China karena pengaruh perkembangan ekonomi Cina yang sukar dihadapi Indonesia serta besarnya peran penduduk Indonesia keturunan Cina dalam bidang ekonomi. Namun selama Cina belum cukup kuat kemajuannya dan masalah Al Qaeda masih menjadi

perhatian utama AS, persoalan kedekatan hubungan Cina-Indonesia belum menjadi masalah bagi AS. Akan tetapi kehidupan bangsa Indonesia lebih terganggu oleh ambisi AS menguasai dunia dengan demokratisasi, HAM dan liberalisasi ekonomi. Usaha AS yang amat agresif dan penetratif amat menekan berkembangnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu menambah kesulitan karena Pancasila didiskreditkan para pemimpin Indonesia sendiri. Reformasi yang terjadi sejak tahun 1998 sebagai akibat tidak langsung dari politik AS bukannya menimbulkan perbaikan berupa kehidupan yang maju menggiatkan, tetapi sebaliknya menghasilkan kondisi tidak stabil dan bahkan kacau. Banyak orang Indonesia kurang dapat menerima tujuan politik luar negeri AS yang dinilai sebagai usaha untuk neokolonialisme dan neoimperialisme. Apalagi liberalisme ekonomi menjadikan masyarakat amat dikuasai pengaruh uang dan benda. Keadaan masyarakat demikian tidak mampu mengubah potensi nasional yang sebetulnya cukup besar menjadi kekuatan nyata. Kemiskinan tetap besar dan menjadi makin besar karena bangsa ditimpa lagi oleh berbagai bencana alam dengan bencana Aceh sebagai terbesar.

Sasaran Jangka Panjang

Agar tujuan nasional, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, makin dekat, bangsa Indonesia pada tahun 2025 harus mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa.

Kekuatan bangsa yang terwujud dari kondisi masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa diperlukan untuk mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga merupakan modal utama bagi perjalanan mencapai tujuan nasional.

Dalam kondisi nasional dan internasional yang telah dikemukakan, usaha mencapai masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa hanya mungkin apabila dilandasi keyakinan yang kuat sehingga terwujud semangat dan tekad teguh untuk mencapai sasaran. Keyakinan itu adalah nasionalisme dan patriotisme dengan dasar Pancasila.

Keyakinan akan kebenaran Pancasila mendorong usaha meningkatkan kesejahteraan yang tinggi dan merata. Menurut *The World Fact Book* GDP per kapita Indonesia pada tahun 2002 adalah USD 3200, sedangkan GDP total berdasarkan PPP adalah USD 758.000 juta. GDP

per kapita Indonesia lebih rendah dari Malaysia (USD 9.000), Thailand USD 7.400), Filipina (USD 4.600) dan Singapura (23.700). Melihat potensi Indonesia adalah tidak berlebihan untuk menentukan GDP per kapita Indonesia pada tahun 2025 sebesar USD 10.000. Dengan penduduk Indonesia sekitar 250 juta orang dicapai GDP sebesar USD 2.500.000 juta.

Kemajuan masyarakat ditentukan oleh mutu dan luas pendidikan umum serta penyelenggaraan riset untuk makin mampu menguasai aneka ragam ilmu pengetahuan dan teknologi. UUD menetapkan bahwa anggaran pendidikan harus mendapat 20 persen dari besarnya APBN. Dapat juga dikatakan harus disediakan 4 persen dari GDP untuk pendidikan. Itu berarti USD 100.000 juta. Sedangkan untuk riset adalah 1 persen GDP atau USD 25.000 juta.

Masyarakat yang berwibawa adalah masyarakat yang dihormati dan disegani oleh kawan dan lawan. Dalam masyarakat itu hukum harus tegak dan kuasa. Indonesia tidak lagi termasuk negara koruptor terbesar di dunia dan kriminalitas makin kurang, termasuk Bergeraknya kaum teroris. Untuk itu ditingkatkan sekali aparat penegak hukum, baik polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan.

Untuk dihormati dan disegani Keamanan Nasional harus terjamin dengan terbangunnya daya tangkal yang efektif. Semua pihak yang hendak mengancam atau mengganggu Indonesia berpikir seribu kali sebelum berani melaksanakan kehendaknya, baik berupa serangan fisik militer atau melakukan pemberontakan bersenjata. Kalau toh berani melakukan, dapat diatasi dengan cepat dan efektif.

Daya tangkal itu antara lain harus didukung kondisi dan peran TNI yang andal. Untuk menjaga RI yang negara kepulauan TNI harus merupakan kekuatan harmonis di darat, laut dan udara Untuk menyusun, membangun kemampuan dan memelihara organisasi itu TNI harus mendapat anggaran yang memadai. Anggaran TNI pada waktu ini sekitar USD 1.000 juta atau sekitar 1 persen GDP. Anggaran itu ternyata jauh dari memadai. Jangankan untuk mewujudkan organisasi yang terlatih baik dan selalu siap, untuk memberikan syarat kehidupan minimal saja tidak terpenuhi. Singapura sebagai negara kota mempunyai anggaran pertahanan sebesar USD 4.470 juta pada tahun 2001 atau 4.9 persen GDP. Kiranya wajar kalau anggaran TNI diproyeksikan sebesar 3 persen GDP (Malaysia tahun 2001 3,46 persen GDP) atau USD 75.000 juta.

Masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa dengan nasionalisme Pancasila sebagai landasan moral, mental dan spiritual adalah berbeda sekali dari masyarakat Indonesia sekarang. Karenanya juga akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan yang timbul dari kondisi internasional yang amat dinamis.

Pembangunan Politik

Usaha membangun masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa dalam 20 tahun mendatang bukan hal yang mudah dan ringan. Terutama karena bangsa Indonesia sekarang dalam kondisi yang terpuruk secara mental dan moral. Usaha itu merupakan perjuangan berat secara mental, moral dan fisik yang memerlukan keyakinan kuat akan kebenaran arah, tujuan serta sasaran yang hendak dicapai. Keyakinan itu harus menghasilkan niat dan tekad yang teguh menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang akan menghadang usaha mulia itu.

Keyakinan itu harus dihasilkan oleh cinta dan kesetiaan mendalam terhadap tanah air dan bangsa berupa nasionalisme dan patriotisme yang berhaluan Pancasila sebab dengan nilai-nilai Pancasila keyakinan itu mempunyai dasar moralitas yang luhur karena kita akan se-

lalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan dasar Pancasila nasionalisme kita tidak akan menjadi chauvinisme dan xenophobia karena kita akan selalu berpedoman kepada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan Pancasila kita tidak menyepelkan dan mengaktirikan suku bangsa, etnik yang aneka ragam dan penganut kepercayaan yang berbeda karena selalu mengutamakan persatuan Indonesia. Pancasila akan selalu mengingatkan kita bahwa patriotisme kita bukan paham yang mementingkan kalangan yang kaya belaka, melainkan mementingkan seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan serta kita selalu menjunjung tinggi keadilan sosial.

Sikap kebangsaan demikian pernah ada ketika kita mulai melaksanakan perjuangan kemerdekaan kita, tetapi sekarang sukar dicari karena dalam perubahan zaman kita kurang mampu mengatasi berbagai pengaruh yang datang dari lingkungan internasional dan nasional yang hendak menguasai kita untuk kepentingannya.

Untuk mencapai tujuan nasional serta Sasaran Jangka Panjang 20 tahun mendatang sikap kebangsaan itu harus kita kembangkan dan gelorakan kembali. Inilah dasar pembangunan politik yang mutlak diperlukan

untuk mewujudkan tekad dan semangat perjuangan mencapai kehidupan bangsa yang kita inginkan.

Pimpinan nasional harus mempersatukan segenap unsur yang masih setia kepada Pancasila dan Indonesia dalam satu gerakan yang meliputi semua pihak dan golongan. Gerakan itu harus bersifat lintas-partai politik dan lintas-organisasi agama serta organisasi sosial dengan mengajak seluruh bangsa berbuat positif yang hasilnya dirasakan sebagai kebaikan oleh seluruhnya. Semua merasa berkepentingan akan datangnya masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa.

Gerakan itu lambat laun harus berhasil makin memencilkan sikap dan pandangan yang ada dalam masyarakat yang telah membuat Indonesia cerai-berai dan bahkan kehilangan harapan akan masa depan sehingga memilih berbuat destruktif serta bersedia menjual negara untuk kepentingan pihak lain.

Gelora gerakan kebangsaan itu membawa negara dan bangsa memasuki era baru yang mengakhiri secara kongkrit zaman penjajahan. Era peradaban Indonesia Pancasila.

Pembangunan Ekonomi

Gelora kebangsaan disalurkan dalam pembangunan eko-

nomi yang menyejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi menjadi kunci kesejahteraan rakyat masa depan. Tidak mungkin kita mencapai Sasaran Jangka Panjang yang menghendaki terwujudnya penghasilan per kapita sebesar USD 10.000 kalau tidak ada pembangunan ekonomi yang sukses dengan setiap tahun mencapai pertumbuhan sekitar 7 persen setiap tahun selama 20 tahun. Hal ini sukar terjadi tanpa ada semangat dan tekad kuat pada seluruh bangsa. Akan tetapi tidak boleh terulang bahwa pembangunan ekonomi adalah usaha yang mengutamakan golongan kecil dan mengakibatkan kesenjangan lebar antara kaya dan miskin. Pembangunan ekonomi harus menyejahterakan seluruh bangsa.

Gelora kebangsaan mendukung pembangunan ekonomi dengan menciptakan harmoni antara kepentingan pusat dan daerah dan meniadakan sikap pusat yang mengabaikan kepentingan daerah atau sebaliknya sikap daerah yang tidak mau menyadari ke-Indonesiaannya.

Seluruh potensi bangsa dan bumi Indonesia yang kita miliki sebagai kemurahan Tuhan Yang Maha Esa harus dapat kita kembangkan dan manfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan. Potensi kelautan yang ada pada kita

dalam jumlah banyak dan variasi aneka ragam, belum pernah kita sentuh sejak kita merdeka. Sekarang waktunya untuk benar-benar mengejawantahkan bahwa Indonesia adalah tanah air kita yang memerlukan perkembangan baik di tanah maupun di air. Kekayaan laut yang selama ini malahan lebih menguntungkan bangsa lain, mulai sekarang harus kita jadikan sumber kesejahteraan yang penting. Bersama-sama dengan perkembangan kekayaan kita di darat. Pariwisata harus jauh lebih banyak kita kembangkan karena secara faktual Tuhan memberikan kepada kita bahan dan potensi untuk mempunyai daya tarik kepada orang lain. Alam kepulauan kita yang indah, manusia Indonesia yang dasarnya ramah tamah lemah lembut penuh senyum simpul serta sopan santun, warisan budaya yang unik dan eksotik, itu semua merupakan potensi penting bagi peningkatan kesejahteraan. Yang kita perlukan adalah kecakapan mengorganisasi dan mengelola potensi itu agar menjadi sumber kesejahteraan banyak orang. Kalau bangsa lain yang jauh lebih terbatas potensi wisatanya dapat mengeruk kekayaan dari potensi itu, hendaknya gelora kebangsaan dapat mendorong kita semua untuk mampu berbuat serupa dan bah-

kan lebih baik.

Untuk menjamin bahwa betul seluruh rakyat menjadi sejahtera, Pembangunan Ekonomi harus membelikan perhatian besar kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Segala kecakapan yang diperoleh kaum ekonomi Indonesia ketika belajar Ilmu Ekonomi harus dapat diarahkan untuk dapat mengembangkan UKM itu. Perhatian besar kepada UKM tidak berarti mengabaikan usaha besar. Sebab majunya UKM berarti banyak orang berusaha dan mempunyai penghasilan yang merupakan daya beli untuk membeli hasil produksi usaha besar. Juga perkembangan UKM yang secara empiris membuktikan kemampuan menciptakan lapangan kerja banyak akan mengurangi tekanan politik yang dapat terjadi terhadap usaha besar.

Dengan berkembangnya daya beli masyarakat perdagangan harus merupakan keseimbangan antara ekspor dan perdagangan dalam negeri. Dengan jumlah penduduk melebihi 220 juta orang yang mempunyai daya beli makin tinggi kita tidak perlu tergantung secara berlebihan kepada dunia luar. Perdagangan dalam negeri yang luas menggerakkan pelayaran dalam negeri. Makin banyak kapal Indonesia mengarungi lautan, menjadikan bangsa Indonesia tuan di rumah-

nya sendiri.

Di pihak lain kita tidak boleh mengabaikan usaha besar sebab kita memerlukan perkembangan industri dengan berbagai kemampuan, termasuk produksi alat-alat yang makin canggih dengan teknologi tinggi. Sebab itu kita perlu meningkatkan kerjasama dengan bangsa lain, khususnya yang telah mampu menghasilkan produksi teknologi tinggi. Kita harus menemukan konsep bagaimana menimbulkan daya tarik mereka untuk berproduksi di Indonesia, tetapi pada ketika yang sama meningkatkan kemampuan bangsa kita sendiri dalam produksi dengan teknologi tinggi. Dalam hal ini kita perlu pelajari apa yang telah dilakukan bangsa Jepang pada tahun 1960-an dan bangsa Korea serta China di masa kini.

Segala potensi bumi kita harus kita manfaatkan dengan cerdas dan bijaksana agar dapat menghasilkan pemanfaatan yang maksimal dalam masa panjang. Sebab ada potensi yang habis sekali dimanfaatkan, seperti terjadi dalam pertambangan. Untuk itu penelitian dan pengembangan harus menjadi bagian penting dari semua usaha kita, terutama dalam bidang kelautan yang masih belum cukup dijamah perlu ada kegiatan Litbang yang kemudian memberikan kecakapan bagaimana meng-

organisasi dan mengelola dengan baik seluruh potensi kelautan kita yang begitu banyak:

Dalam hal itu semua kita tidak boleh mengabaikan sektor pertanian. Negara tidak akan aman kalau tidak menjaga bahwa bahan makanan tersalia dengan memadai dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi di pihak lain itu hanya dapat tercapai kalau kaum Petani juga mempunyai penghasilan yang memadai. Dengan kondisi alam dan bumi Indonesia kita sebetulnya tidak perlu tergantung pada bangsa lain mengenai hasil pertanian. Kita harus menyadari itu dan gelora kebangsaan hendaknya memotivasi dan mendorong agar kita dapat berusaha lebih intensif dan saksama dalam mencari jalan memanfaatkan kondisi alam dan bumi kita. Bahkan produksi pertanian yang dilakukan dengan memanfaatkan kondisi alam dan bumi dapat diekspor dan kita pergunakan membantu bangsa-bangsa lain yang masih hidup kesukaran.

Juga kehutanan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan kalau diorganisasi dan dikelola dengan baik, sebagaimana dibuktikan bangsa Finlandia. Di satu pihak kekayaan

kita berupa hutan tropis yang kurang dipunyai bangsa lain, harus lebih baik kita urus dan tidak diperlakukan seperti yang

terjadi hingga kini. Di pihak lain kita dapat mengembangkan kehutanan sebagai industri karena kondisi alam dan bumi yang memungkinkan itu.

Pandangan singkat dan amat terbatas tentang Pembangunan ekonomi perlu diakhiri dengan pernyataan bahwa yang diperlukan adalah kepemimpinan bidang ekonomi yang mempunyai wawasan luas, kemampuan menterjemahkan wawasan itu dalam konsep dan memimpin serta mengelola usaha perekonomian dengan tekad dan semangat yang teguh.

Pembangunan Pendidikan dan Riset

Untuk membuat bangsa Indonesia maju tetapi tetap berpijak pada kepribadian sendiri perlu ada pembangunan pendidikan yang efektif. Sekaligus usaha itu menyediakan SDM yang mahir, cerdas dan bermental patriotik untuk mengsucceskan pembangunan ekonomi. Dana yang disediakan untuk pendidikan sebanyak 4 persen dari GDP harus benar-benar digunakan dengan semestinya. Untuk itu Pembangunan Pendidikan harus berorientasi pada pelaksanaan pendidikan secara bermutu pendidikan yang tidak bermutu tidak saja menghamburkan dana secara percuma, tetapi juga malah-

an menghasilkan manusia yang bersifat negatif dan menghambat, bahkan mungkin destruktif terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Pendidikan bermutu itu harus menjangkau anak didik sebanyak mungkin agar seluruh rakyat turut serta dalam kemajuan. Karena mayoritas bangsa masih miskin maka menjadi kewajiban negara untuk semaksimal mungkin membebaskan rakyat dari biaya pendidikan untuk putera-puterinya. Hal itu terutama perlu dilakukan untuk anak didik sejak di Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Lanjutan Pertama (SLP), yaitu dari umur 4 tahun hingga 15 tahun. Bahkan kalau kemampuan dana memadai diperpanjang sampai selesai dengan Sekolah Lanjutan Atas (SLA).

Harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa ada standard mutu pendidikan yang sama di seluruh Indonesia, khususnya mulai Sekolah Dasar (SD) hingga SLA yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini juga berlaku untuk pendidikan Islam yang dilakukan dalam pendidikan Madrasah (Ibtidaiyah, Tsana-wiyah, Aliyah). Tidak menjadi soal digunakan istilah atau

nama khusus bagi pendidikan Islam, tetapi substansi pendidikan umum harus pula diraih anak didik di Madrasah. Kalau tidak, maka mereka menjadi warga negara yang dirugikan dalam kehidupan bangsa masa kini dan masa depan yang sangat dipengaruhi daya saing dan kompetensi.

Pengertian wajib belajar bagi anak didik tidak hanya bahwa mereka wajib mengikuti pendidikan sesuai umurnya, tetapi bahwa pendidikan yang mereka tempuh diperoleh atas biaya negara. Itu berarti bahwa sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan yang bersifat wajib belajar juga menerima dana bagi pendidikan itu selama sekolah swasta itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, antara lain dapat mencapai standar mutu yang berlaku.

Peran pendidikan kejuruan yang berlangsung di SMK perlu ditonjolkan agar mempunyai daya penarik semestinya bagi anak didik. Juga jumlah SMK harus ditambah sehingga dapat menampung minat anak didik yang memilihnya; itu semua dilakukan dengan tetap menjaga standar mutu pendidikannya. Makin banyak SMK dapat menghasilkan lulusan dengan mutu yang sesuai dengan keperluan pasar kerja, makin menguntungkan bagi perkembangan

ekonomi dan sosial. Masuk SMK tidak berarti tertutup kemungkinannya untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi asalkan syarat-syarat mengikuti pendidikan itu dipenuhi.

Mutu Pendidikan Tinggi harus benar-benar dijaga, baik itu untuk Pendidikan Tinggi Kejuruan yang menghasilkan sarjana Diploma maupun Pendidikan Tinggi Profesi yang menghasilkan sarjana Strata lulusan Pendidikan Tinggi Kejuruan dengan mutu tinggi terutama akan menjamin bahwa produksi masyarakat akan bermutu, sedangkan lulusan Pendidikan Tinggi Profesi yang bermutu menjamin berfungsinya semua profesi dalam masyarakat sesuai penguasaan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin secara baik.

Selama kemampuan pembiayaan negara masih kurang memadai, Pendidikan Tinggi hanya disubsidi sehingga mahasiswa masih kena kewajiban membayar pendidikannya. Diusahakan adanya sistem beasiswa yang memungkinkan pemberian bantuan kepada mahasiswa yang menunjukkan prestasi menonjol, dengan mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Namun negara harus terus berusaha agar satu saat juga dapat membebaskan biaya Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa berwar-

negara lain yang telah maju seperti Korea Selatan, India atau Singapura. Langkah demi langkah bangsa Indonesia harus sanggup berkiprah dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih banyak patent dihasilkan atas nama pakar Indonesia. Satu ketika ada seorang pakar sains Indonesia memperoleh hadiah nobel. Akan tetapi yang lebih utama adalah bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi makin memajukan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pembangunan Hukum

Membuat masyarakat berwibawa hanya mungkin kalau dalam masyarakat itu hukum berkuasa. Dalam kenyataan dalam masyarakat Indonesia hukum jauh dari berkuasa. Hukum malahan cenderung digunakan untuk menguatkan ketidakadilan.

Sejak bangsa Indonesia melaksanakan revolusi Indonesia pada tahun 1945 boleh dikatakan bahwa hukum kurang mendapat tempat semestinya dalam kehidupan bangsa. Dalam revolusi kita menjebol nilai-nilai kolonial termasuk tata hukum karena itu semua merupakan bagian

penting dari sistem penjajahan. Akan tetapi setelah revolusi selesai kita tidak atau belum menegakkan hukum satu negara merdeka. Akibatnya adalah bahwa Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai negara hukum dalam kenyataan tidak menjunjung tinggi tegaknya hukum. Demi pencapaian tujuan nasional keadaan demikian harus berakhir dan berakhir secepat mungkin.

Sebab itu pembangunan hukum harus dilakukan dengan penuh tekad dan semangat, tidak hanya karena penting untuk mensukseskan pembangunan ekonomi yang memerlukan kepastian hukum, tetapi lebih penting lagi adalah untuk terwujudnya tujuan nasional, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Sebenarnya mereka yang berada dalam aparat hukum tidak terlalu kurang pengetahuannya akan hukum. Akan tetapi mereka tidak menegakkan hukum sebagaimana harusnya karena faktor mental dan moral. Sehingga mereka malahan turut terbawa dalam sikap dan cara berfikir masyarakat yang keluar dari hukum. Padahal seharusnya justru mereka yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam tegaknya hukum.

Itu berlaku bagi aparat pengadilan, kejaksaan maupun ke-

polisian. Oleh sebab itu seluruhnya harus diolah agar mengalami perubahan mental dan moral. Dimulai dengan memperbaiki penghasilan mereka sehingga tidak ada alasan lagi tentang kurangnya keperluan kehidupan. Sebagai ukuran penghasilan memadai dipakai tingkat penghasilan negara lain yang berhasil menegakkan hukum. Keadaan di Malaysia dapat digunakan sebagai perbandingan. Namun setelah perbaikan penghasilan harus ada sikap yang tegas untuk menindak setiap pelanggaran hukum oleh anggota aparat hukum, melebihi dari sikap terhadap warga di luar aparat hukum.

Pada waktu bersamaan diadakan perbaikan dalam hukumnya sendiri, agar yang ditegakkan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ini juga menyangkut hukum yang memungkinkan aparat hukum bertindak lebih tegas dan kongkrit dalam menghadapi terorisme. Adalah kesalahan berpikir kalau ada yang menentang adanya ketentuan hukum yang tegas dan keras terhadap terorisme dengan alasan hak azasi manusia. Sebab perilaku

teroris dan akibat yang ditimbulkan pada masyarakat sama sekali di luar batas kemanusiaan. Justru untuk mencegah tindakan itu terjadi harus ada ketentuan

hukum yang memungkinkan tindakan terhadap teroris sekalipun pada saat itu ia belum berbuat.

Khusus aparat kepolisian, selain harus mengadakan perubahan kondisi mental dan moral secara drastis, juga perlu dimungkinkan meningkatkan kemahiran dalam berbagai aspek teknologi modern yang mendukung pekerjaan melawan kriminalitas. Ini amat penting karena kriminalitas cenderung meningkat dalam kuantitas maupun kualitas, dan itu tidak hanya di Indonesia.

Polisi harus sanggup menangani perbuatan kriminal mulai yang paling sederhana hingga paling canggih dan besar seperti *white collar crime*, *money laundering*, dan lain-lain dan terorisme yang menggunakan segala macam alat peledak, termasuk alat peledak nuklir, senjata biologi dan kimia. Peningkatan kemampuan kepolisian ini harus mendapat dukungan biaya yang memadai demi tegaknya kekuasaan hukum.

Pembangunan Kekuatan Pertahanan

Pembangunan kekuatan pertahanan atau militer adalah syarat kedua untuk membuat masyarakat berwibawa. Wibawa bangsa akan terwujud kalau kekuatan pertahanan meman-

carkan daya tangkal, yaitu menimbulkan persepsi pada pihak-pihak yang bermaksud mengancam Republik Indonesia bahwa akan mengalami pukulan berat kalau melakukan ancaman atau gangguan itu. Hal itu berlaku bagi negara lain yang mungkin mempunyai ambisi menyerang Indonesia secara fisik-militer untuk mendukung kepentingan nasionalnya. Juga berlaku bagi orang-orang di dalam dan luar negeri yang mempunyai pikiran melakukan pemberontakan bersenjata untuk mencapai tujuan politiknya.

Oleh sebab itu dana yang disediakan bagi pembangunan TNI sebanyak sekitar 3 persen dari GDP harus ditujukan kepada pembentukan kekuatan yang mampu memancarkan daya tangkal itu dan menindak secara tuntas dan efektif kalau ada yang tidak menghiraukan daya tangkal itu.

Bagi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan diperlukan TNI yang merupakan kekuatan harmonis dan pada tingkat semakin tinggi dari kekuatan militer darat, laut dan udara. Namun daya tangkal yang kuat tidak hanya diwujudkan oleh TNI, melainkan harus dipancarkan oleh kekuatan seluruh rakyat Indonesia yang ber-

sedia dan mampu mempertahankan tanah air dan bangsa terhadap segala ancaman dan tantangan, baik berupa agresi dari luar negeri maupun pemberontakan di dalam negeri.

Penutup

Dengan mencapai kondisi masyarakat sejahtera, maju dan berwibawa, Indonesia akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan lingkungan internasional. Bersamaan dengan itu Indonesia mampu menjalankan peran positif untuk membangun, kesejahteraan internasional dan menjaga perdamaian dunia, sebagaimana dikehendaki UUD 1945.

Demikianlah satu gagasan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk tahun 2005-2025.

Mudah-mudahan uraian yang terbatas ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPN yang lengkap dan cocok bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hendaklah menjadi pedoman kuat bahwa RPJPN yang disusun akan makin mendekatkan bangsa Indonesia pada pencapaian tujuan nasional, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

